



**DINAS SOSIAL
KOTA METRO**



Renja

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA METRO

2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah.	15
2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD.....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan	37
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
 BAB V PENUTUP.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja ‘

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Metro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial dalam penyusunan RKA Dinas Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Penulisan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

8

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rensra Perangkat Daerah

16 Pelaksanaan evaluasi Renja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk :

- 1) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
 - 24 a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut

32 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Realisasi anggaran untuk Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 menurut program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

40

TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.203.475.382	2.949.958.312	90
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.020.000	10.020.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.020.000	10.020.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.692.227	2.458.742.427	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.498.227	2.196.216.427	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.200.000	193.200.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.560.000	58.560.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.496.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.934.000	8.930.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.364.000	45.206.407	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.364.000	45.206.407	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.815.000	189.510.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.174.000	9.168.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.150.000	9.150.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.656.500	119.295.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.460.500	25.460.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.396.000	21.840.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.978.000	4.596.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.054.155	50.421.798	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.054.155	47.421.798	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.530.000	196.057.580	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.780.000	159.787.580	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000	17.830.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.900.000	18.440.000	
2	Program Pemberdayaan Sosial	958.199.300	924.670.797	100
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.715.100	30.628.037	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	32.715.100	30.628.037	

	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	925.484.200	894.042.760	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	220.608.500	220.608.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.000.000	41.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	144.096.000	140.024.378	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	519.779.700	492.409.882	
3	Program Rehabilitasi Sosial	970.971.150	892.096.079	91,88
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	486.496.050	436.724.653	
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	149.189.750	143.122.250	
	Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	115.128.600	107.295.350	
	Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	135.614.100	110.792.553	
	Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan	42.350.600	31.358.000	
	Sub Kegiatan Layanan Rujukan	44.213.000	44.156.500	

	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	484.475.100	455.371.426	
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	145.897.700	125.457.700	
	Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.250.900	58.530.900	
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	273.326.500	271.382.826	
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	367.167.550	299.605.100	81,60
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	367.167.550	299.605.100	
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.100.000	36.097.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	61.538.150	42.348.150	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	179.124.400	134.759.950	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	90.405.000	86.400.000	
5	Program Penanganan Bencana	184.891.900	103.462.916	55,96
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	102.732.700	30.828.950	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	88.045.900	19.973.150	
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	14.686.800	10.855.800	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	82.159.200	72.633.966	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	82.159.200	72.633.966	

6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.019.500	36.963.900	99,85
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.019.500	36.963.900	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.019.500	36.963.900	
	Total	5.721.724.782	5.206.757.104	91

Berdasarkan tabel di atas, diketahui alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 untuk program dan kegiatan yang terdakup pada sasaran prioritas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.721.724.782,- dan yang terealisasi sebesar Rp 5.206.757.104,- atau sebesar 91 %.

Secara umum program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2022 sudah berjalan sesuai dengan yang rencanakan . Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada tahun 2022 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah pada urusan Sosial antara lain Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani dengan baik serta persoalan kemiskinan yang membutuhkan perhatian ekstra. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan cara mengoptimalkan segala sumber daya baik dana, Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang ada pada OPD. Kemudian akan diupayakan untuk bersinergi dengan perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Metro melalui Progran CSR, untuk berperan serta aktif dalam menangani kemiskinan yang ada di Kota Metro sehingga upaya mewujudkan masyarakat Kota Metro yang sejahtera dapat segera terealisasi. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditinjau dari realoisasi anggaran sampai dengan Desember 2022 sebesar 91 % .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

80 Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Mretro didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis meliputi :

1. Cakupan layanan Rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas;
- 88 2. Cakupan layanan Pemberdayaan sosial dengan cara meningkatkan layanan pemberdayaan sosial terhadap Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan, meningkatkan layanan sosial dan pemberdayaan terhadap perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang, Penerbitan rekomendasi Surat Tanda Daftar LKS, Akreditasi LKSA, Undian Gratis Berhadiah, dan pengumpulan uang/barang;
- 96 3. Cakupan layanan Perlindungan dan jaminan sosial dengan cara meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang (direkonsiliasi) selama masa tanggap darurat, meningkatkan Tagana yang berkemampuan dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana, meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan upaya perlindungan bagi kepesertaan PKH, JKN dan program linsos lainnya;
- 104 4. Cakupan layanan Kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan PSKS, meningkatkan pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan Sosial lainnya agar masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meningkatkan layanan kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga miskin, meningkatkan layanan keluarga miskin untuk mengakses bantuan UEP/KUBE.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain pelayanan yang diberikan sesuai dengan kegiatan Perangkat Daerah, pada Dinas Sosial juga memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dengan memperhatikan Standar Pelayanan Publik yang tersusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya :

- 112 1. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS PBI.
2. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar
3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pelayanan Rekomendasi bagi Lanjut Usia Terlantar ke Pantti Jompo
5. Pelayanan Pemberian Bantuan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100

Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar

- 120 Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantti.
- 128 4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar pantti, Indikator pencapaian jumlah warga.Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar pantti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &

136 paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian
Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Kota Metro adalah sebagai berikut

- 144 a) Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
disebabkan belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial serta
adanya Dampak Wabah Penyakit akibat Virus Corona (Covid 19);
- b) Kurangnya partisipasi sosial dan kepedulian warga dalam upaya
penanggulangan PPKS disebabkan belum optimalnya layanan pemberdayaan
sosial;
- 152 c) Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial
sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, wabah
penyakit dan fenomena alam disebabkan belum optimalnya layanan
perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Adanya beberapa warga masyarakat yang belum terpenuhi hak dasarnya
secara layak sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan
bermartabat disebabkan belum optimalnya penanganan kemiskinan.

160 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai
koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan
perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga
tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara
filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya
mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar
mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi
permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam

168 aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung

176 Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu

184 dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

192

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

200

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar

208

9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
- 216 14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
- 224 22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

232 Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan, kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

240

disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur 22 atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL METRO TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Baru/Permendagri 90 Tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 0 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,660,392,94 4	
1 0 0 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran			2,799,478,09 4	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	10 Dokumen	10,003,850	APBD
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	2,993,950	APBD
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan penhyusunan dokumen RKA- SKPD (Dinas Sosial)	Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA Skpd	Kota Metro	4 dokumen	4.015.950	APBD

1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	4 dokumen	2993950	APBD
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	2.305,323,589	
1	6	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan		23 ASN	2.031.625.739	APBD
1	6	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 THL	198.500.000	APBD
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 orang	62.160.000	APBD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	Kota Metro, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 dokumen	4.637.900	APBD
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	8.399.950	APBD
1	0	0	2.0		Administrasi Umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	Kota Metro	12 Bulan	230.865.300	

1	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	Kota Metro	20 jenis alat listrik	9.175.000	APBD
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	3 jenis	4.914.000	APBD
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	Kota Metro	85 jenis	118.397.500	APBD
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	Kota Metro	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	26.958.800	APBD
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	Kota Metro	8 Surat Kaabar	19.272.000	APBD
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	Kota Metro	17 kali	52.148.000	APBD
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Metro	2 Sub Kegiatan	59.897.355	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	Metro	300 Materai	3.000.000	APBD
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	Metro	2 Jenis	56.897.355	APBD
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Metro	3 Sub Kegiatan	198.388.000	

1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	Metro	10 unit kendaraan	166.780.000	APBD
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Metro	8 Peralatan	15.630.000	APBD
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	Metro	Perbaikan ruang data	10.978.000	APBD
0 1	0 6	0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			374.591.850	
0 1	0 6	0 2	2.0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya izin dalam pengelolaan undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Metro		15.000.000	
01	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	Kota Metro	100 Peserta	15.000.000	APBD
0 1	0 6	0 2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah	Kota Metro	4 Sub Kegiatan	359.591.850	

01	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kota Metro	30 orang	216.608.500	APBD
1	6	2	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kota Metro	5 orang	40.000.000	APBD
01	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan;	Kota Metro	27 Karang Taruna	102.983.350	APBD
0	0	0			PROGAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				3.000.000	
0	0	0	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan				3.000.000	
0	0	0	2.01	01	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota		3 orng	3.000.000	APBD
1	6	3								

1 0 0 6 4	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial	Kota Metro		830.998.200	
0 0 0 2.0 1 6 4 1	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjujt usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti	Kota Metro		383.196.800	APBD
01 06 04 2.01 01	Penyediaan permakanan	Jumlah Penerima Penyediaan permakanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	Kota Metro	60 Orang	59.999.750	APBD
1 06 04 2.01 02	Penyediaan sandang	Jumlah Penerima Penyediaan sandang rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	Kota metro		29.999.850	APBD
1 06 04 2.01 03	Penyediaan alat bantu	Jumlah penerima penyediaan alat bantu	Kota metro		50.000.000	APBD
1 06 04 2.01 04	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penerima layanan reunifikasi keluarga	Kota metro		10.000.000	APBD
1 06 04 2.01 05	Pemberian bimbingan fisik,mental spiritual ,dan sosial	Jumlah penerima bimbingan fisik	Kota metro		30.000.000	APBD

1	6	4	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas	Kota Metro	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	70.000.000	APBD
1	6	4	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan	Kota Metro	4.350 Keluarga	85.086.000	APBD
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	Kota Metro	70 anak	35.111.200	APBD
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota metro	20 anak	3.000.000	APBD
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Sistem Layanan Rumah Terpadu (SLRT), Jumlah masyarakat yang menerima layanan	Kota Metro	70 Orang	10.000.000	APBD
1	0	0	2.0		Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Kota Metro	100 Orang dan 13 kegiatan	447.801.400	
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	Kota Metro	50 Orang	49.999.900	APBD

1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	Kota Metro	Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta/Bulan , TKSK 5 org dan PSM 25 Org	397.801.500	APBD
1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Metro	20 Orang	190.301.300	APBD
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar				2.000.000	
1	0	0	2.0	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak -Anak yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota		10 orang	2.000.000	APBD
1	0	0	2.0		Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	22 Kelurahan	9.205 Jiwa	188.301.300	APBD
1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	22 Kelurahan	9.205 Jiwa	36.100.000	APBD
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	22 Kelurahan	9.205 Jiwa	69.766.300	APBD
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	terlaksanya bansos pangan sembako dengan baik	Metro	8000 kpm	54.435.000	APBD
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	kondisi ekonomi masyarakat berkembang	Metro	30 orang	30.000.000	APBD

1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial			120.000.000	
1	0	0	2.0		Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		100%	105.000.000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	Kota Metro	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	65.000.000	APBD
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah paket bansos sandang	Kota metro		10.000.000	APBD
1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampung pengungsi	Jumlah tempat penampung pengungsi	Kota metro		20.000.000	APBD
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Kota Metro		10.000.000	APBD
1	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesipsiagaan Bencana	Kota Metro	100 Peserta	15.000.000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	Kota Metro	30 Peserta	15.000.000	APBD
1	0	0			PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan			342.023.500	

0	0	0	2.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP	Kota Metro		342.023.500	
1	6	7	1							
01	06	07	2.01	02	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	Kota Metro	1 paket	15.000.000	APBD
1	6	7	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peringatan hari-hari besar dan Talik Asih kepada para pejuang, warakawuri TNI & Polri	Kota Metro	1 paket	327.023.500	APBD
JUMLAH									5.355.221.43	
									2	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Kelujrahan, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kota maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Komunitas Lansia, Organisasi Wanita, Kelompok Disabilitas , Asosiasi – asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan program, sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SAMPAI 2019
Penurunan Penduduk Miskin dan Rentan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	1,00
	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar	1,00
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) PMKS dan kelompok marginal lainnya yang putih dan berkembang keberfungsian sosialnya	2,61
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70,00
			Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80,00
			Persentase (%) sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00
			Persentase (%) peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	1,00
		Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	45,55
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial	Meningkatkan kapasitas SDM kesejahteraan sosial	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang bersertifikasi	30,00
		Meningkatkan layanan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	17,30

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan program, sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut.

Pemerintah yang mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan 2021, antara lain untuk mengantisipasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dalam pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang akan di tempuh pada tahun 2021 akan di titik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penggalan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat dimana di awal tahun 2020 Dunia sedang dilanda Wabah Virus Corona (Covid 19) termasuk didalamnya negara Indonesia, Sehingga kita perlu memprioritaskan Program dan Kegiatan yang mendukung percepatan dalam penanganan Covid 19 yaitu dengan membuat Kegiatan Kegiatan yang

memprioritaskan Penanganan Dampak Covid 19 dengan melalui Refocusing Anggaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah acuan bagi jajaran Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan program dan indikasi kegiatan tahunan., memudahkan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan yang telah dilaksanakan dan memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kota Metro dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan tahunan berikutnya.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk Menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “. Sebagaimana termuat paa tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi Pemerintahan Kota Metro: <i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	1. Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh dan meningkatnya kjualitas sumbrrr daya manusia	Meningkatkan kualitas sekolah untuk memenuhi standar layanan melalui peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; peningkatan kualitas dan parasarana sekolah; peningkatan manajemen pengelolaan satuan pendidikan; dan pengembangan pendidikan karakter. Meningkatkan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak. Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fungsi perpustakaan. Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah melalui Pelestarian dan

		pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan local. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan semesta melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; peningkatan sarana prasaran pelayanan kesehatan; dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas; peningkatan status gizi; peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat; dan Percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana.
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	3. Meningkatnya kualitas konektivitas kota dan Meningkatnya kualitas	Pengelolaan infrastruktur jalan melalui Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan. Meningkatkan manajemen lalu-lintas kota melalui Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan perekonomian daerah	4. lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan peningkatan pengelolaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengelolaan Kuantitas dan kualitas

		infrastruktur perkotaan melalui Pengelolaan kualitas lingkungan hunian dan Pengelolaan kualitas kawasan permukiman. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui peningkatan edukasi proteksi kebakaran, meningkatkan kapasitas petugas kebakaran dan sarpras penanganan kebakaran.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan	5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi daerah Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan	Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; pengembangan industri kreatif; peningkatan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat padat karya; peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar; dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia usaha; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sektor ekonomi; peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan; dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Optimalisasi kerja birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi

		dalam penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara; peningkatan kualitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Mengoptimalkan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism. Penguatan kesetaraan dan kebebasan hak-hak sipil melalui Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
6. yang akuntabel, efektif dan efisien	6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi yang terintegrasi melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi; peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; dan peningkatan keterbukaan informasi public. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas sistem birokrasi pelayanan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP); peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan yang inklusif; peningkatan kapasitas prasarana pelayanan publik dan sdm aparatur pelayanan publik; dan pengintegrasian proses pelayanan public. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui

		peningkatan profesionalisme anggota Sat.Pol. PP, peningkatan penegakan produk hukum daerah, optimalisasi operasi penertiban umum; dan Penanganan konflik secara damai.
--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi pPemereintahan maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program Merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksana suatu rencana.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan Layanan Rujukan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5 Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/ ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
								Target	Rp
1					2	3	4	7	8
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,660,392,944
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran			2,799,478,094
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	10,003,850

1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja		2 dokumen	2,993,950
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	2.305,323,589
1	6	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan		23 ASN	2.031.625.739
1	6	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji		12 THL	198.500.000
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan		1 orang	62.160.000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun		1 dokumen	4.637.900
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun		2 Dokumen	8.399.950

1	06	01	2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah		12 Bulan	230.865.300
1	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor		20 jenis alat listrik	9.175.000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 jenis	4.914.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor		85 jenis	118.397.500
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy		12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	26.958.800
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah		8 Surat Kaabar	19.272.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan		17 kali	52.148.000

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2 Sub Kegiatan	59.897.355
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor		300 Materai	3.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan		2 Jenis	56.897.355
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang- barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Sub Kegiatan	198.388.000
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		10 unit kendaraan	166.780.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara		8 Peralatan	15.630.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai		Perbaikan ruang data	10.978.000

01	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			374.591.850
01	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya izin dalam pengelolaan undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang			15.000.000
01	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB		100 Peserta	15.000.000
01	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah		4 Sub Kegiatan	359.591.850
01	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		30 orang	216.608.500
1	6	2	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		5 orang	40.000.000

01	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan;		27 Karang Taruna	102.983.350
1	06	04			PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial	50%		830.998.200
01	06	04	2.01		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti	0%		383.196.800
01	06	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah Penerima Penyediaan permakanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	—	60 Orang	59.999.750
1	06	04	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah Penerima Penyediaan sandang rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	50%		29.999.850

1	06	04	2.01	03	Penyediaan alat bantu	Jumlah penerima penyediaan alat bantu			50.000.000
1	06	04	2.01	04	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penerima layanan reunifikasi keluarga			10.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian bimbingan fisik,mental spiritual ,dan sosial	Jumlah penerima bimbingan fisik			30.000.000
1	6	4	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas		UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	70.000.000
1	6	4	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan	0%	4.350 Keluarga	85.086.000

1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	0 Jiwa	70 anak	35.111.200
							60%		
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Sistem Layanan Rumah Terpadu(SLRT), Jumlah masyarakat yang menerima layanan	80%	70 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan	Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	48	100 Orang dan 13 kegiatan	447.801.400

					Napza di Luar Panti Sosial				
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	48	50 Orang	49.999.900
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	29 Orang	Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta/Bulan, TKSK 5 org dan PSM 25 Org	397.801.500
							10		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial		20 Orang	190.301.300
1	06	05	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan		9.205 Jiwa	188.301.300

1	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata		9.205 Jiwa	36.100.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	4.120 org	9.205 Jiwa	69.766.300
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	terlaksana bansos pangan sembako dengan baik	225	8000 kpm	54.435.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	kondisi ekonomi masyarakat berkembang		30 orang	30.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial	35		120.000.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	5000 Orang	100%	105.000.000

1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum		75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	65.000.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Jumlah paket bansos sandang			10.000.000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampung pengungsi	Jumlah tempat penampung pengungsi			20.000.000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial				10.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		100 Peserta	15.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA		30 Peserta	15.000.000
1	06	07			PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan			342.023.500
01	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP			342.023.500
01	06	07	2.01	02	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara		1 paket	15.000.000

1	6	7	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peringatan hari-hari besar dan Talik Asih kepada para pejuang, warakawuri TNI & Polri		1 paket	327.023.500
---	---	---	------	----	---	--	--	---------	-------------

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai atau dilaksanakan, dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro pada Tahun 2023. Rencana Kerja juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan, dan Rencana Kerja juga dapat digunakan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan di Kota Metro. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Rencana Kerja ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah. Indikator Kinerja yang ditetapkan menjadi acuan bagi setiap atasan dalam menilai bawahan. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan Pembangunan di bidang Sosial Kota Mmetro dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan spirasi yang diharapkan masyarakat. Hasil-hasil Pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta

dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670210 198703 1 002